



**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN**
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates
Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)

TESIS

ARI FEBRIATI, S.H.
2110622027

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2023



**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN**
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates
Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)

TESIS

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum*

ARI FEBRIATI, S.H.

2110622027

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Ari Febriati, S.H.**

NRP : **2110622027**

Tanggal : **15 Juli 2023**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Ari Febriati, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Febriati, S.H.
NRP : 2110622027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Agama Wates Nomor 335/Pdt.G/2020/PA. Wt)”**

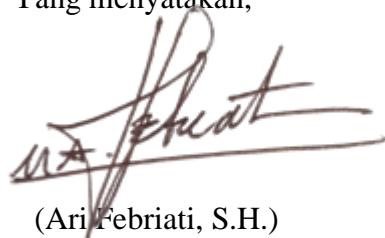
Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Ari Febriati, S.H.)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-7635971, Fax. 021-7656904
Laman: fh.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

TESIS

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBATALAN PERKA WINAN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)

ARI FEBRIATI, S.H.

2110622027

Telah disetujui untuk Ujian Tesis

Dr. Suherman, S.H., LLM.

NIDN 0302067004

Jakarta, 6 Juni 2023

Mengesahkan,

Dr. Handar Subhandi B., S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes

NIP 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-7635971, Fax. 021-7656904
Laman: fh.upnj.ac.id, e-mail: fh@upnj.ac.id

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Ari Febriati, S.H.
NRP : 2110622027
ProgramStudi : Magister Hukum
Judul Tesis : **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

NIDN. 0304036203

Penguji I

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIDN. 196806081994032001

Dekan

Penguji II

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIDN. 0302067004

Kaprodi



Ditetapkan di: **Jakarta**
Tanggal Ujian: **15 Juli 2023**

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)

Ari Febriati-2110622027

Abstrak

Perkawinan dinyatakan sah jika sejalan dengan aturan agama dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana UU Perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran perkawinan sebagaimana diatur UU tersebut maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, terdapat pertentangan antara peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan peran dari advokat, dan muncul adanya ketidakpastian hukum terkait JPN dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan status pria yang sudah beristri. Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana kewenangan JPN dalam pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan status pria yang sudah beristri. Metode dalam riset ini adalah yuridis normatif. Hasil riset bahwa pembatalan perkawinan yang dimohonkan JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat terjadinya perkawinan yang artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada/terjadi. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan agar JPN mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam pembatalan perkawinan terkait poligami.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara.

AUTHORITY OF STATE PROSECUTORS IN THE ANNULMENT OF MARRIAGES (Case Study of The Determination of The Wates Religious Court Number 335/Pdt.G/PA.Wt)

Ari Febriati - 2110622027

Abstract

Marriage is declared valid if it is in line with religious rules and has fulfilled the legal conditions of a marriage as stipulated in the Marriage Law. If there is a violation of marriage as regulated by the law, a marriage annulment can be carried out. Based on the Determination of the Wates Religious Court No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, there is a conflict between the role of the State Attorney (JPN) in submitting a marriage annulment application and the role of an advocate, and there is legal uncertainty regarding the JPN being able to cancel a marriage against a man who is already married. This study aims to examine how the authority of the JPN in the annulment of marriage against the falsification of the status of a man who is already married. The method in this research is normative juridical. The result of the research is that the annulment of marriage requested by JPN on the basis of falsifying the status of a man who is already married is legally valid and legally binding and applies from the time of the marriage, which means that the marriage is considered to have never existed / occurred. There is a need for legal reform in the Marriage Law so that JPN has a definite legal position in canceling marriages related to polygamy.

Keywords: *Marriage Annulment, Authority, State Attorney.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala karunia-Nya sehingga penulisan tesis berjudul **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dan tahapan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta pada semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan banyak pihak, oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Yth.:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Periode 2023 – 2027 sekaligus sebagai Dosen Pembimbing tesis;
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Periode 2019 – 2023;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., Wakil Dekan
4. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm. Kes, Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji proposal tesis;
6. Bapak Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H., selaku Penguji 1 proposal tesis;
7. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn., sebagai Ketua Penguji Tesis;
8. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., sebagai Penguji 1 tesis;
9. Bapak Erik Meza Nusantara, S.E., S.H., M.H., M.M., Koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
10. Bapak Eriksa Ricardo, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kulon Progo;
11. Keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi.
12. Seluruh Dosen Pengajar dan seluruh Staf Fakultas Hukum program studi Magister Hukum UPN Veteran Jakarta.

Tidak lupa penulis berdoa semoga amal kebaikan tersebut dibalas oleh Tuhan YME dengan segala yang terbaik, Amin.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 Juli 2023

Penulis

(Ari Febriati, S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	5
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Penelitian-penelitian terdahulu	15
2.2. Kerangka Teoritis	17
2.3. Keragka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Pendekatan Penelitian	46
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	48

**BAB IV KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan PA Wates
No. 335/PDT.G/2020/PA.WT)50**

**4.1. Kekuatan Penetapan Pembatalan Perkawinan No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt
Yang Dimohonkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Berdasarkan Pemalsuan
Status Pria Yang Sudah Beristri50**

**4.2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dapat Memberikan Kepastian
Hukum Atau Tidak Dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan Atas
Dasar Pemalsuan Status Pria Yang Sudah Beristri Berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt. 58**

BAB V. PENUTUP 63

5.1. Kesimpulan 63

5.2. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71